JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 3, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA HAMBUKU HULU DAN TAMBALANG KECIL)

Sari Ananda Rahma Dewi[1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Nida Urahmah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: anandassari24@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi program penurunan stunting di Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil ditemukan beberapa fenomena, di antaranya belum maksimalnya upaya pemerintah dalam menangani stunting dilihat dari program yang dijalankan hanya pemberian makan tambahan (PMT), masyarakat hanya bergantung pada program pemerintah, perilaku masyarakat yang belum sejalan dengan upaya penurunan stunting serta kesadaran masyarakat yang rendah, kerjasama yang dilakukan terkait percepatan penurunan stunting oleh pihak terkait dengan masyarakat belum maksimal. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program penurunan stunting di Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data informan berjumlah 13 informan dengan teknik *Snow Ball*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya data diuji kredebilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi dan mengadakan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program di kedua desa tersebut tergolong berjalan kurang baik. Dari segi indikator sumber daya manusia, pemahaman pelaksana kebijakan dan sikap menerima/menolak serta kondisi politik dikategorikan baik. Selanjutnya dari segi kriteria kebijkan serta tujuan kebijakan dikategorikan kurang baik. Kemudian, organisasi formal, koordinasi dan kerjasama dikategorikan cukup baik, sedangkan organisasi informal, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial dikategorikan belum baik. Faktor pendukungnya mencakup kolaborasi antar petugas serta pemahaman pelaksana program yang baik. Faktor penghambatnya adalah minimnya penganggaran dana desa untuk pelaksanaan program serta pola asuh orangtua yang belum benar.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Penurunan Stunting

ABSTRACT

The implementation of the stunting reduction program in Hambuku Hulu Village and Tambalang Kecil Village revealed several phenomena, including the government's efforts to address stunting not being optimal, as seen from the program being implemented, which only provides supplementary feeding (PMT). The community relies solely on government programs, and community behavior is not in line with stunting reduction efforts. In addition, community awareness is low, and cooperation between relevant parties and the community to accelerate stunting reduction is not optimal. The objective of this study is to understand how the stunting reduction program is implemented in Hambuku Hulu Village and Tambalang Kecil Village, as well as the factors influencing it. This study employs a qualitative approach with a descriptive-qualitative research type. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data sources consist of 13 informants using the snowball technique. The data is analyzed using data reduction, data display, and drawing conclusions and verification. The data credibility was tested through extended observation, increased persistence, triangulation, and member checking. The results of the study indicate that the programs in both villages are not running well. In terms of human resource indicators, understanding of policy implementation and attitudes of acceptance/rejection, as well as political conditions, are categorized as good. However, in terms of policy criteria and policy objectives, they are categorized as poor. Furthermore, formal organization, coordination, and cooperation are categorized as fairly good, while informal organization, economic conditions, and social conditions are categorized as not yet good. Supporting factors include collaboration among officials and good understanding of program implementers. Hindering factors include insufficient village funding for program implementation and improper parenting patterns.

Keyword: *Implementation, Program, Stunting Reduction*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada hakikatnya mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan ini mencakup layanan dalam bentuk regulasi maupun layanan langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, utilitas umum, dan sektor lainnya. Di antara berbagai sektor tersebut, kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia.

Pada era modern seperti saat ini, peningkatan kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama dari berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga elemen masyarakat sendiri. Kendati telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam bidang kesehatan masih tetap ada dan perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah persoalan kesehatan pada balita.

Masa balita merupakan tahap yang sangat penting dalam fase pertumbuhan seorang anak. Di usia ini, anak mengalami perkembangan yang sangat cepat baik dari sisi fisik, kognitif, maupun emosional. Oleh karena itu, aspek kesehatan balita memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, tenaga medis, masyarakat umum, hingga pemerintah. Aspek-aspek yang menjadi penentu dalam kesehatan balita meliputi kecukupan nutrisi, pemberian imunisasi, kondisi kebersihan, serta stimulasi perkembangan anak secara menyeluruh.

Stunting adalah salah satu persoalan kesehatan yang menjadi tantangan besar dan merupakan ancaman serius bagi balita di Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi kelima di dunia. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka 21,5%, hanya mengalami penurunan sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Angka ini masih lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh

Adapun beberapa faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi antara lain adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai, kurang optimalnya koordinasi antar sektor maupun antar program, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses pangan terutama di kalangan keluarga miskin, tingginya angka kejadian penyakit infeksi, pola asuh ibu yang belum memadai, serta masih terbatasnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Stunting merupakan suatu kondisi terhambatnya pertumbuhan anak, yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Keadaan ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama, seringnya anak mengalami infeksi berulang, serta kurangnya rangsangan psikososial selama masa kritis pertumbuhan, yaitu dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Hal ini menjadi isu serius di Indonesia karena membawa dampak buruk terhadap perkembangan fisik, kemampuan kognitif, serta produktivitas anak di masa mendatang. Sayangnya, masih ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa kondisi tubuh pendek adalah hasil dari faktor keturunan, dan tidak berkaitan dengan aspek kesehatan. Padahal, kenyataannya pengaruh faktor genetik terhadap kondisi kesehatan seseorang sangat kecil jika dibandingkan dengan faktor lingkungan serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Kondisi stunting dapat terjadi karena adanya berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kekurangan asupan gizi secara kronis, infeksi yang terjadi secara berulang, terbatasnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, serta rendahnya dukungan dalam aspek ekonomi dan sosial. Anak yang mengalami penyakit ini memiliki beberapa ciri, seperti tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan standar tinggi badan anak seusianya. Selain itu, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam hal konsentrasi dan daya ingat, serta mengalami penurunan kemampuan berpikir dan prestasi akademik, dan juga lebih rentan terkena penyakit, khususnya penyakit infeksi, karena umumnya mengalami gangguan pada sistem metabolisme serta penurunan daya tahan tubuh. Ciri lainnya adalah pertumbuhan gigi yang terlambat, tampilan wajah yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya

karena pertumbuhan yang tidak optimal, anak cenderung lebih pendiam dan jarang melakukan kontak mata (*eye contact*), berat badan tidak bertambah bahkan bisa mengalami penurunan, serta pada anak perempuan mengalami keterlambatan dalam memasuki masa menstruasi.

Penanganan stunting di Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dalam upaya mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai dasar pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan stunting di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan berbagai program intervensi stunting secara tepat, sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa program unggulan yang dijalankan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain adalah: *pertama*, DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang), yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara dini adanya gangguan atau penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. *Kedua*, MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi anak usia 0 hingga 59 bulan, dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian pada balita. *Ketiga*, DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) adalah program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi seimbang bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting. *Keempat*, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) adalah kegiatan pemberian asupan tambahan bergizi kepada balita dan ibu hamil, yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi mereka. *Kelima*, Imunisasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap berbagai penyakit, sehingga anak tidak mudah terserang penyakit atau jika pun terkena, gejalanya lebih ringan. *Keenam*, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) merupakan penerapan pola hidup yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. *Ketujuh*, CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) adalah praktik sanitasi dasar yang sangat efektif untuk mencegah penularan berbagai jenis penyakit, terutama yang menyebar melalui tangan yang kotor. *Kedelapan*, Pos Pemulihan Gizi (PPG) adalah layanan yang diberikan di Posyandu untuk balita yang mengalami masalah gizi, termasuk pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, serta pemberian makanan tambahan. *Kesembilan*, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita merupakan kegiatan kelompok belajar bagi ibu hamil dan ibu yang memiliki balita, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam merawat dan mendidik anak dengan benar. *Kesepuluh*, Sosialisasi dan Konseling ASI serta MPASI adalah kegiatan edukasi kepada ibu hamil, keluarga, dan masyarakat luas mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif serta makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. *Kesebelas*, Penyuluhan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) bertujuan untuk mendorong setiap keluarga agar memahami dan menerapkan perilaku konsumsi gizi yang baik dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. *Keduabelas*, ISI Piringku adalah panduan makan dengan gizi seimbang yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan yang bergizi seimbang demi mendukung tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa Pelaksanaan Program pada kedua desa belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator *pertama*, belum maksimalnya upaya pemerintah dalam menangani stunting dilihat dari belum adanya program yang dijalankan. Pada desa Hambuku Hulu kegiatan PMT hanya dilaksanakan saat posyandu tidak ada PMT khusus untuk anak stunting, sedangkan pada desa Tambalang Kecil baru berjalan 1 bulan pada bulan Mei tahun 2025 yaitu bantuan pemberian telur untuk anak stunting. *Kedua*, Masyarakat desa hanya bergantung pada program Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga upaya untuk memperbaiki gizi anak tidak maksimal. *Ketiga*, perilaku masyarakat yang belum sejalan dengan upaya penurunan stunting, kesadaran masyarakat yang rendah terlihat dari masih banyaknya memiliki gaya hidup tidak sehat, pola asuh anak yang sembarangan, dan membiasakan anak makan makanan instan. Contohnya masih banyak anakanak memakan makanan ringan/camilan, mie instan, dan minuman kemasan sehingga nutrisi tidak terpenuhi. *Keempat*, kerjasama terkait program percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pihak terkait dengan

masyarakat belum maksimal terlihat dari masih tingginya angka stunting di Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil. Orangtua anak tidak mau mengikuti saran yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader dengan berbagai alasan. Contohnya pemahaman yang salah terhadap anak yang stunting mereka menganggap bahwa anaknya kurus dan pendek karena faktor genetik. Sehingga kerjasama yang ingin dibangun oleh pihak pemerintah, tenaga kesehatan, kader serta masyarakat belum berjalan baik.

Hasil penelitian terdahulu Skripsi oleh Erina Fahriza (BADAN, n.d.), Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar". Pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Penelitian ini untuk mengetahui perilaku hubungan antara organisasi, perilaku implementor tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan, masih terdapat beberapa desa yang mejadi lokus dengan perolehan status tinggi. Hal ini membuktikan bahwa persebaran kasus stunting masih kurang maksimal dan perlu adanya penangan secara intensif oleh para implementor. Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar dengan menggunakan teori Edward III. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu komunikasi dalam mensosialisasikan masih kurang maksimal, sumber daya staf yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih kurang kualitas dan kuantitasnya, SOP dalam kebijakan program tidak ada penunjukan tim khusus untuk bertanggung jawab dalam kebijakan penurunan stunting.

Selanjutnya, terdapat hasil penelitian dari Jurnal yang ditulis oleh (Ahmad Hidayat, 2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong" penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dikategorikan terimplementasi namun pada indikator sumberdaya dan insentifnya masih berjalan kurang maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai karakteristik individu, kondisi atau gejala dalam kelompok tertentu, guna mengetahui sejauh mana keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lainnya yang ada di masyarakat. Pendekatan kualitatif dalam penelitian pada dasarnya menyerupai proses kerja seorang detektif, di mana peneliti mengumpulkan informasi utama beserta informasi pendukung. Menurut Sitoyo & Sodik (Suharto, 2015) mengklasifikasikan data menjadi yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini (Ibrahim, 2018), yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik penarikan sampel ini adalah *Snow Ball* yang digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilainnya memilih responden dengan tujuan tertentu. Informan yang ditetapkan penulis berjumlah 13 orang. Kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya data diuji kredebilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi dan mengadakan *member check.*

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Penurunan Stunting di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil)

Penelitian ini dikaji oleh peneliti berdasarkan beberapa variabel implementasi yang

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Rulinawaty Kasmad (2018) adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan kebijakan
   a. Kriteria kebijakan yang sesuai

      Kriteria kebijakan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keberadaan kriteria ini sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan efisien dalam menangani permasalahan yang ada.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pada Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil terkait pengimplementasian kriteria kebijakan program penurunan stunting kurang baik, untuk kriteria kebijakan program sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal karena belum adanya pengalokasian dana khusus untuk anak stunting untuk menunjang program tersebut dimasing-masing desa.

   b. Tujuan kebijakan

      Tujuan dari kebijakan program penurunan stunting adalah untuk mengurangi angka prevalensi anak yang mengalami stunting, sekaligus mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas yang baik.

      Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan dalam pengimplementasian program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil kurang baik. Karena tujuan kebijakan dari program penurunan stunting belum tercapai sesuai yang diinginkan.

2. Sumber Daya
   a. Sumber daya manusia

      Keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di antara berbagai sumber daya, manusia merupakan faktor paling utama yang berperan dalam menentukan tercapainya keberhasilan proses implementasi.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pada Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil mengenai sumber daya manusia dalam melaksanakan program penurunan stunting sudah baik. Karena masing-masing kader di desa sudah terlatih dan memahami betul tentang program penangan stunting sehingga membantu mempermudah pelaksanaaan program tersebut.

   b. Sumber dana/finansial

      Sumber daya finansial perlu diperhatikan dan diperhitungkan secara cermat dalam proses implementasi, karena bagaimanapun juga, meskipun sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia, kekurangan anggaran dapat menjadi kendala serius dalam merealisasikan tujuan program yang direncanakan.

      Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, dana hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kedua desa tersebut pengimplementasian sumber dana dalam pelaksanaan program penurunan stunting kurang baik karena tidak ada anggaran khusus untuk intervensi langsung bagi anak stunting sehingga program belum berjalan optimal dan konsisten.

3. Karakteriktik Agen Pelaksana
   a. Organisasi formal

      Organisasi formal merupakan suatu sistem yang dibentuk secara resmi dengan struktur yang terorganisasi, mencakup peraturan tertulis, hierarki jabatan yang jelas, serta prosedur operasional yang ditetapkan guna mendukung kelancaran kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam struktur ini, setiap anggota memiliki peran, tanggung jawab, dan wewenang yang telah ditentukan secara tegas. Umumnya, organisasi formal dijalankan berdasarkan aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa organisasi formal seperti Puskesmas, BKKBN, dan Pemerintah Desa sudah teremplementasi cukup baik pada desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil. Organisasi formal ini sudah melakukan tugasnya masing-masing seperti Puskesmas menghadirkan petugas gizi, BKKBN menghadirkan penyuluh KB, dan Pemerintah Desa menyediakan dana untuk pelaksanaan program. Ketiga organisasi formal ini saling bekerjasama untuk menjalankan program penurunan stunting.

   b. Organisasi informal

      Organisasi informal mengacu pada jaringan dan hubungan sosial yang terbentuk secara alami di dalam suatu kelompok organisasi tanpa adanya pengaturan resmi. Hal ini melibatkan interaksi, hubungan personal, serta dinamika antarindividu yang berkembang tanpa struktur hierarki atau aturan yang baku.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi bahwa untuk pengimplementasian organisasi informal untuk program penurunan stunting belum baik karena tidak ada organisasi formal di kedua desa tersebut.

4. Komunikasi Antarorganisasi
   a. Koordinasi

      Koordinasi adalah proses pengorganisasian dan pengaturan berbagai agen atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu program. Proses ini mencakup upaya menyatukan kegiatan, sumber daya, dan informasi antar agen tersebut agar tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan efisien.

      Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi adalah bahwa koordinasi dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya sudah cukup baik karena melibatkan berbagai pihak serta sudah cukup baik dalam aspek pertemuan dan diskusi.

   b. Kerjasama

      Kerjasama merupakan proses kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat untuk menjamin keterlibatan banyak aktor dan sektor dalam kebijakan. Kerjasama menjadi elemen krusial untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan kewenangan dari berbagai pihak.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi adalah bahwa kerjasama dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya sudah cukup baik karena semua pihak terlibat aktif dalam upaya diskusi mengenai upaya program penurunan stunting walaupun kegiatannya belum optimal.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
   a. Kondisi ekonomi

      Suasana ekonomi yang kurang mendukung dapat menjadi penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi adalah bahwa kondisi ekonomi dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya belum baik karena mayoritas dari kalangan menengah ke bawah serta pendidikan ibu yang rendah.

   b. Kondisi sosial

      Lingkungan sosial mengacu pada faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pembentukan, impkementasi, dan dampak dari kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial, dan dinamika masyarakat yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, ditetapkan, serta diterima oleh masyarakat.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi adalah bahwa kondisi sosial dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya belum baik karena pola asuh orang tua yang salah serta pendidikan ibu yang rendah.

   c. Kondisi politik

      Lingkungan politik merupakan situasi atau konteks di mana keputusan-keputusan politik dibuat, dijalankan, dan menjadi bahan perdebatan. Lingkungan ini melibatkan interaksi antara berbagai kekuatan politik, lembaga politik, partai-partai politik, proses pengambilan keputusan, serta opini masyarakat.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi adalah bahwa kondisi politik dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya baik karena program ini sebagai upaya kesehatan masyarakat dan kondisi politik dikedua desa tersebut tidak ada permasalahan.

6. Disposisi
   a. Pemahaman pelaksana kebijakan

      Pemahaman pelaksana merujuk pada sejauh mana pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang pelaksana terhadap kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi adalah bahwa pemahaman pelaksana dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya sudah baik karena kadernya aktif memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap keluarga berisko stunting serta pelaksaannnya berjalan rutin.

   b. Sikap menerima/menolak

      Sikap menerima (mendukung) maupun menolak merupakan bentuk respons atau pendekatan yang diambil oleh seseorang terhadap suatu ide, konsep, atau keadaan tertentu. Ketika seseorang menunjukkan sikap mendukung, itu berarti ia menyetujui atau memberikan dukungan terhadap hal tersebut, sedangkan sikap menolak mengindikasikan adanya ketidaksetujuan atau penolakan terhadapnya.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi adalah bahwa sikap menerima/menolak dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan

Desa Tambalang Kecil pengimplementasiannya sudah baik karena segala pihak yang berpartisipasi dalam program ini sangat menerima dan mendukung pelaksanaannya karena dampak dari program ini sangat besar dan untuk kebaikan anak-anak serta kesehatan mereka juga.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Penurunan Stunting di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil)

1. Faktor Pendukung
   a. Kerjasama yang Baik Antar Petugas

      Kolaborasi yang solid antar petugas merupakan faktor utama dalam meraih tujuan bersama, membangun suasana kerja yang harmonis, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Melalui saling dukung, komunikasi yang terbuka, dan sikap tanggung jawab yang tinggi, setiap petugas dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Dengan demikian, akan tercipta sinergi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan secara maksimal.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang kuat antara semua pihak merupakan faktor pendukung utama keberhasilan program penurunan stunting. Tanpa koordinasi yang optimal, pelaksanaan program dapat terhambat, dan ntervensi terhadap anak stunting tidak dapat berjalan secara maksimal.

   b. Kompetensi Pelaksana Program yang Baik

      Kompetensi pelaksana program yang memadai menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan, karena pelaksana yang memiliki kompetensi mampu menunjukkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara optimal. Pelaksana yang kompeten juga memahami dengan jelas tujuan program dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang dihadapi di lapangan.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa dengan pemahaman pelaksana yang baik seperti tenaga kesehatan dan kader dapat memberikan edukasi yang lebih akurat, merancang intervensi yang lebih efektif, serta mengidentifikasi tantangan di lapangan dengan lebih baik.

2. Faktor Penghambat
   a. Minimnya Penganggaran Dana Desa untuk Program Penurunan Stunting

      Terbatasnya alokasi dana desa untuk program menjadi daat menghambat upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada balita dan ibu hamil. Tanpa dukungan anggaran yang mencukupi, pelaksanaan berbagai intervensi seperti edukasi gizi, penyediaan makanan tambahan, perbaikan sanitasi, serta layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala tidak dapat berjalan secara maksimal.

      Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa dengan minimnya penganggaran dana desa untuk program penurunan stunting ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program penurunan stunting di kedua desa tersebut.

   b. Pola Asuh Orangtua yang Belum Benar

      Pola asuh orangtua yang tidak tepat merupakan salah satu faktor yang turut berperan dalam munculnya berbagai masalah perkembangan anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orangtua mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang,

kebersihan lingkungan, serta pemberian stimulasi tumbuh kembang yang sesuai, yang pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa dengan pandangan masyarakat tentang stunting yang belum benar karena ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program penurunan stunting di kedua desa tersebut.

SIMPULAN

Implementasi Program Penurunan Stunting di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil) terimplementasi kurang baik. Bisa dilihat dari beberapa variabel berikut. *Pertama*, Kriteria kebijakan terimplementasi belum baik karena kriteria kebijakan penurunan stunting belum optimal di kedua di desa Hambuku Hulu, belum ada bantuan khusus untuk anak stunting dari pemerintah desa. Sedangkan di desa Tambalang Kecil alokasi dana masih terbatas, sehingga program belum berjalan maksimal. *Kedua*, Sumber daya manusia sudah baik dan berpotensi dalam mengimplementasikan program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil. Sedangkan untuk sumber dana atau finansial pada Desa Hambuku Hulu belum baik karena tidak ada pembagian bantuan untuk anak khusus stunting. Kemudian, pada Desa Tambalang Kecil sumber dana juga terbatas sehingga bantuan untuk anak stunting baru terlaksana di bulan Mei tahun ini *Ketiga*, Organisasi formal di Desa Hambuku Hulu dan Desa Tambalang Kecil sudah cukup terimplementasi dengan baik karena adanya pihak pelaksana dari Puskesmas, BKKBN, dan Pemerintah Desa. Ketiga organisasi formal ini lah yang bekerjasama dalam program penurunan stunting pada Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil. Kemudian, untuk organisasi informal belum terimplementasi sama sekali pada Desa Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil. *Keempat*, Koordinasi untuk pelaksaan program penurunan stunting terimplementasin dengan baik, Hambuku Hulu: koordinasi dan kerja sama telah terimplementasi, tetapi masyarakat masih berharap adanya bantuan khusus untuk anak stunting dari pemerintah desa. Tambalang Kecil: koordinasi berjalan baik, tetapi kerja sama dengan masyarakat belum optimal. *Kelima*, Kondisi ekonomi pada Desa Hambuku Hulu belum terimplementasi dengan baik, karena kabanyakan anak yang stunting dari kalangan menegah ke bawah. Kemudian, pada Desa Tambalang Kecil kondisi ekonomi pada desa tersebut juga belum terimplementasi dengan baik mayoritas anak yang stunting dari kalangan yang kurang mampu. Kondisi sosial pada desa Hambuku Hulu dan desa Tambalang Kecil belum terimplementasi dengan baik dikarenakan pola asuh orangtua yang salah dan pendidikan si ibu yang rendah, pendidikan si ibu kebanyakan hanya lulusan SD dan SMP sehingga pemahaman mengenai stunting sedikit lambat. Untuk kondisi politik di kedua desa tersebut sudah baik, karena kondisi politik di desa tersebut tidak ada yang bermasalah pelaksanaan program stunting tetap berjalan semestinya sesuai kebijakan yang ada. *Keenam*, Pemahaman pelaksana pada program penurunan stunting sudah terimplementasi dengan baik, Hambuku Hulu dan Tambalang Kecil: Para petugas dan kader memiliki pemahaman yang kuat mengenai stunting dan upaya penurunannya. Sikap menerima/menolak pada program penurunan stunting sudah terimplementasi dengan baik, karena di kedua desa menerima program ini dengan baik karena manfaatnya dalam menurunkan angka stunting, memperbaiki gizi anak, dan meningkatkan kesehatan mereka. Faktor yang mempengaruhi penelitian ini yaitu faktor pendukung: *Pertama*, sumber daya manusia karena setiap kader pada kedua desa tersebut telah terlatih dan memahami program penurunan stunting. *Kedua*, pemahaman pelaksanan kebijakan karena kadernya aktif memberikan pendekatan dan penjelasan terkait bahaya stunting terhadap keluarga berisko stunting. *Ketiga*, sikap menerima/menolak karena segala pihak yang berpartisipasi dalam program ini sangat menerima dan mendukung pelaksanaann program penurunan stunting. *Keempat*, organisasi formal

karena adanya partisipasi Puskesmas, BKKBN, serta Pemerintah Desa setempat dalam pelaksanaan program penurunan stunting. *Kelima*, koordinasi karena semua pihak terkait yang terlibat berpartisipasi aktif dalam upaya pelaksanaan program penurunan stunting di kedua desa tersebut. *Keenam*, kerjasama karena tenaga kesehatan serta kader desa aktif melakukan upaya pencegahan stunting serta aktif memberikan saran serta masukan saat rembug stunting. *Ketujuh*, kondisi politik karena program penurunan stunting dikedua desa tersebut tidak berkaitan dengan politik sehingga upaya pencegahan stunting tersebut murni karena ingin memperbaiki generasi. Faktor penghambat: *Pertama*, kriteria kebijakan karena pelaksanaaan program pada kedua desa tersebut belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. *Kedua*, tujuan kebijakan karena pelaksanaan program penurunan stunting dikedua desa tersebut belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. *Ketiga*, sumber daya dana/finansial karena dikedua desa tersebut sumber dana/finansial untuk program penurunan stunting belum memadai. *Keempat*, kondisi ekonomi karena keluarga yang anaknya stunting atau beresiko stunting mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. *Kelima*, kondisi sosial karena mayoritas permasalahan dikedua desa tersebut adalah pola asuh orangtua yang salah serta pendidikan ibu yang rendah. *Keenam*, organisasi informal karena pada kedua desa tersebut tidak ada pembentukan organisasi masyarakat yang tujuannya membantu penanganan stunting di desa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BADAN, O. B. O. P. K. (n.d.). *JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*.

Ibrahim, D. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Beserta Contoh*. Bandung.

Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*.